

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sejak adanya pemerintahan di daerah sehingga bisa terjadi regulasi, bergulirnya era reformasi gagasan tentang perubahan atas pembangunan yang sentralistik tersebut menggemakan dengan munculnya gagasan otonomi daerah. Seiring dengan perkembangan ini, pemerintah Indonesia melakukan terobosan agar pola pembangunan bisa digeser ke daerah. Daerah dipandang sebagai suatu keharusan dalam mengembangkan pembangunan yang merata dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pembangunan di Indonesia telah memasuki era keterbukaan sejak reformasi yang digulirkan oleh mahasiswa. Semula pembangunan hanya terpusat (*sentralistik*) pada masa sekarang, sejak otonomi daerah digulirkan, pemerintah daerah bisa melakukan dan mempercepat pembangunan di daerah.

Selanjutnya, tiap upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah memerlukan suatu proses perencanaan yang efektif. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu langkah menuju pencapaian tujuan yang dapat direalisasikan melalui implementasi maksud dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, baik oleh individu maupun organisasi. Tujuan yang sudah ditentukan tersebut seharusnya telah menjadi hasil kesepakatan publik atau keputusan bersama melalui mekanisme demokrasi yang dilakukan bersama-sama oleh pihak

eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, dengan harapan masa depan menjadi lebih baik dan dapat dievaluasi secara transparan.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendorong laju percepatan pembangunan guna terpenuhinya kebutuhan layanan masyarakat. Salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Oleh sebab itu, Pembangunan infrastruktur jalan sangat penting karena akan memperlancar lalu lintas orang dan barang antar pusat kegiatan ekonomi maupun antar wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan tersedianya infrastruktur jalan yang berkualitas, maka akan mendukung terciptanya kegiatan ekonomi masyarakat dan peluang usaha lainnya dengan baik. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merupakan daya tarik sekaligus daya dorong bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Kewajiban inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana jalan bagi kepentingan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor.32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya memiliki kewajiban untuk menjalankan urusan yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana umum. Proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan yang salah satunya adalah dibidang infrastruktur jalan. Di dalam sebuah pemerintah, baik kabupaten maupun kota akan menjadi daerah yang baik manakala ada ketersediaan sarana dan prasarana khususnya jalan yang memadai yang akan memberikan ruang yang kondusif dan daya dukung bagi setiap kegiatan yang lainnya, maupun kegiatan pemerintahan, perdagangan, pariwisata, industri, pertanian, dan pendidikan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya) Dalam pelaksanaan tugas dan pokok sebagaimana diuraikan dalam peraturan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Lingkungan Hidup memiliki fungsi, termasuk di dalamnya evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup.

Kebijakan suatu pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu proses yang seringkali terjadi dalam pembangunan adalah proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan dilapangan. Hal ini penting untuk dilakukan karena

pembangunan pada dasarnya memiliki dampak perekonomian yang akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Terkait dengan Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal yang menjadi persoalan berdasarkan dokumen rencana strategis Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026.

Berdasarkan dokumen tersebut, permasalahan pada bidang infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya secara umum dapat dilihat bahwa masih banyaknya pengguna jalan melebihi tonase yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan jalan di Kabupaten Tasikmalaya cepat mengalami kerusakan. Persoalan selanjutnya adalah terkait dengan hasil kajian jalan yang perlu dianalisis kembali atau diperbaharui secara rutin dan berkala sesuai dengan perkembangan terakhir kondisi lapangan. Karena faktanya jalan di Kabupaten Tasikmalaya masih banyak ditemukan belum baik. Disamping itu, masih rendahnya kondisi baik jalan pada sistem jaringan jalan di Kabupaten Tasikmalaya. Sistem jaringan jalan yang ada belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang.

Terkait dengan kajian di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, jalan merupakan prsarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan

lori, dan jalan kabel.

Selanjutnya, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011- 2031 dalam pasal 12 ayat 3 huruf a menyebutkan bahwa pengembangan jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan jalan kolektor 2 (dua) meliputi ruas jalan Ciawi- Singaparna. Jalan tersebut melewati wilayah Kecamatan Cisayong yang berada ditengah-tengah antara Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Singaparna. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan tersebut, di seperti rumah makan atau restoran serta tempat rekreasi.

Berdasarkan kajian yang telah dibahas di atas, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peranan penting dalam membangun infrastruktur jalan yang terhubung dari Kecamatan Singaparna sampai dengan Kecamatan Ciawi. Pembangunan jalan ini dalam upaya untuk menghubungkan antara Ibu Kota Tasikmalaya yang berada di Kecamatan Singaparna dan jalur utara terutama Ciawi dan sekitarnya. Sehingga pembangunan sarana jalan ini dapat menjadi akses dan sarana transportasi yang baik bagi terciptanya lalu lintas sehat, dan dampaknya perekonomian masyarakat menjadi maju.

Posisi Kabupaten Tasikmalaya yang cukup strategis di wilayah Priangan Timur (Garut, Tasik, Ciamis, Banjar) menjadi daya tarik bagi perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Selain posisinya yang strategis Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki

kekhasan tersendiri, terutama Tasikmalaya utara yang terkenal dengan produksi kerajinan Rajapolah. Oleh karena itu, dibukanya akses jalan Singaparna-Ciawi oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya salah satu tujuannya adalah untuk menghubungkan Pusat Pemerintahan dengan jalur perdagangan yaitu wilayah Tasikmalaya utara. Beberapa Kecamatan yang terlewati oleh akses jalan singaparna ciawi diantaranya adalah Kecamatan Singaparna, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Cisayong, Kecamatan Jamanis, Kecamatan Sukahening, Kecamatan Rajapolah, dan Kecamatan Ciawi.

Selain itu, Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu mitra dan penyangga Provinsi Jawa Barat, khususnya sebagai sentra pertanian yang cukup signifikan dan maritim yang ada di wilayah Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Cikalong. Terkait bidang pertanian yang masih menjadi tarik bagi Kabupaten Tasikmalaya maka pembangunan sarana jalan Singaparna-Ciawi guna mewujudkan perekonomian masyarakat yang salah satunya dibidang pertanian.

Berdasarkan studi pendahuluan, peneliti mencermati bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau (RPJMD) disebutkan bahwa ada sejumlah persoalan terkait infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2020, hanya sekitar 71,39% atau sejauh 930,479 Kilometer dari total panjang jalan Kabupaten Tasikmalaya yang mencapai 1.303,32 Kilometer yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Selain kurangnya optimal dalam penyediaan fasilitas pendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah, pengendalian

dan pemantauan terhadap kendaraan berat yang melampaui Muatan Sumbu Terberat (MST) juga belum mencapai tingkat optimal, yang berdampak pada kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Berikut ini tabel pemanfaatan tata ruang Kabupaten Tasikmalaya.

**Tabel.1.1.**

**Presentase Pemanfaatan Tata Ruang**

No	Tahun	Pemanfaatan Tata Ruang	Prosentase	
			Kenaikan	Penurunan
1.	2019	10,62	-	-
2.	2020	10,81	0,19	-

Sumber: RPJMD 2020 ( Diolah Peneliti)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap pemanfaatan rencana tata ruang dan kurangnya efektivitas dalam mengendalikan pemanfaatan ruang merupakan masalah yang dihadapi. Pada tahun 2020, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Rencana Tata Ruang tercapai sebesar 10,81%, melampaui target sebesar 10,60%. Meskipun terjadi peningkatan sebesar 0,19% dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 10,62%, pencapaian tersebut masih dianggap rendah. Fasilitas publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat baru mencakup 41,50% atau 83 bangunan dari total kebutuhan sebanyak 200 unit di Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilihat dari target dan realisasi anggaran sebagai berikut ini :

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Anggaran**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2022			Capaian (%)	Program	Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berdasarkan penataan ruang yang terpadu serta berwawasan lingkungan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Poin	0,511	0,542	106,05	Program Penyelenggaraan Jalan	131.095.943.016	122.441.188.700	93,40
		Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	69,51	69,51	100	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22.833.244.875	21.200.183.080	92,85
		Cakupan Ketersediaan Bangunan Pemerintahan dan Fasilitas Pendukungnya yang Layak Difungsikan	Persen	51,04	51,40	100,71	Program Penataan Bangunan Gedung	222.310.000	221.979.150	99,85
							Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	27.013.670.000	26.046.718.751	96,42
Ketaatan terhadap RTRW	Persen	29,50	22,44	76,06	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	485.350.000	485.275.000	99,98		

Sumber : Data LAKIP 2022 ( Diolah Peneliti)

Berdasarkan tabel tersebut dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya, terdapat perbedaan antara target dan realisasi pada beberapa program utama. Program penyelenggaraan jalan menunjukkan realisasi anggaran sebesar Rp 122,4 miliar dari pagu Rp 131 miliar, dengan capaian kinerja sebesar 106,05% dalam proporsi panjang jaringan jalan yang dalam kondisi baik. Namun, beberapa indikator lainnya, seperti ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menunjukkan realisasi yang lebih rendah, yaitu 76,06% dari target, meskipun realisasi anggaran hampir mencapai 100%. Permasalahan ini mencerminkan adanya



tantangan dalam efektivitas alokasi dan penggunaan anggaran, serta keberlanjutan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Tasikmalaya. Khususnya di Kecamatan Cisayong, perbedaan antara target dan realisasi tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan infrastruktur jalan.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada evaluasi pembangunan infrastruktur jalan Cisinga yang terdapat di Kecamatan Cisayong. Keberadaan jalan tersebut di Kecamatan Cisayong merupakan jalan yang cukup strategis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Kecamatan Cisayong yang berada di tengah antara Kecamatan Singaparna yang berada di pusat Kota dan Tasikmalaya utara yaitu Kecamatan Ciawi dan sekitarnya. Jalan Ciawi-Singaparna merupakan salah satu arteri transportasi penting yang menghubungkan beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Jalan ini memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas penduduk, perdagangan, dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi status jalan tersebut yang secara khusus yang berada di Kecamatan Cisayong.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan jalan ini. Jalan Ciawi-Singaparna adalah jalan yang melewati Kecamatan Cisayong. Jalan ini yang menghubungkan dua kawasan utama, yaitu Ciawi di bagian utara dan Singaparna di bagian

selatan. Meskipun jalan ini memiliki peran strategis, kondisinya dapat mengalami variasi dalam hal kepadatan lalu lintas, kualitas permukaan jalan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Terkait persoalan yang sering terjadi adalah permasalahan utama adalah kualitas permukaan jalan yang bervariasi. Beberapa bagian jalan mungkin mengalami kerusakan yang memengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Selanjutnya pada aspek keselamatan, kurangnya rambu lalu lintas, penerangan malam yang buruk, dan kondisi jalan yang berbahaya dapat mengancam keselamatan pengguna jalan.

Sementara pada aspek yang lainnya adalah konektivitas dengan modal transportasi lain seperti angkutan umum dan jalur kereta api perlu ditingkatkan untuk memudahkan akses ke jalan ini. Problem lainnya adalah peningkatan lalu lintas dan pengembangan jalan dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan, termasuk deforestasi, kerusakan ekosistem alam, dan perubahan sosial.

Berdasarkan studi pendahuluan, Kajian ini memberikan pemahaman awal tentang kondisi dan permasalahan yang terkait dengan Jalan Ciawi-Singaparna khususnya yang berada di Kecamatan Cisayong. Kajian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana dan strategi yang lebih baik dalam mengelola dan meningkatkan jalan ini guna mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada kenyataannya, Kecamatan Cisayong yang terletak antara Kecamatan Singaparna dan Kecamatan Ciawi, memiliki sejumlah

kendala dalam hal infrastruktur jalan yang perlu diperhatikan. Wilayah ini, dengan potensi alam dan budayanya yang kaya, menghadapi tantangan terkait jalan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya, menurut data dari BPS pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tasikmalaya bahwa, jumlah penduduk Kecamatan Cisayong sebanyak 61121 jiwa yang terdiri atas 31036 jiwa penduduk laki-laki dan 30085 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103 orang.

Kondisi di atas menyebabkan banyaknya kegiatan dan mobilisasi yang terpusat pada Kecamatan Cisayong sebagai akibat dari pola pembangunan yang cukup pesat di Kecamatan Cisayong. Pertumbuhan pembangunan di Kecamatan Cisayong semenjak pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan pusat Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya dengan Tasikmalaya utara.

Seiring dengan itu, dari segi kelembagaan, organisasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sektor jalan dan jembatan, yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kajian fenomena aktual yang telah dibahas di atas, terdapat permasalahan tentang pembangunan jalan di Kecamatan Cisayong yang keberadaannya perlu dievaluasi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme evaluasi

pembangunan infrastruktur jalan Cisayong yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut secara ilmiah, maka penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: **“EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN CISAYONG KABUPATEN TASIKMALAYA.”**

## **B. Identikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disajikan, beberapa poin identifikasi permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam konteks evaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, antara lain:

1. **Kualitas Permukaan Jalan yang Variatif:** Adanya variasi kualitas permukaan jalan di Jalan Ciawi-Singaparna, termasuk di Kecamatan Cisayong, yang dapat memengaruhi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, Kerusakan pada beberapa bagian jalan yang dapat menjadi hambatan bagi mobilitas dan keselamatan pengguna jalan.
2. **Keselamatan Lalu Lintas:** Kurangnya rambu lalu lintas, penerangan malam yang buruk, dan kondisi jalan yang berbahaya sebagai faktor-faktor yang dapat mengancam keselamatan pengguna jalan di Jalan Ciawi-Singaparna.
3. **Keterbatasan Fasilitas Publik:** Fasilitas publik sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat baru mencakup persentase yang rendah dari total kebutuhan, menciptakan keterbatasan dalam

aksesibilitas dan konektivitas wilayah.

4. Kendala Infrastruktur dalam Pertumbuhan Ekonomi: Tantangan terkait infrastruktur jalan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup di wilayah Kecamatan Cisayong.
5. Kendala Kelembagaan: Perlu evaluasi terhadap mekanisme evaluasi pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
6. Pengendalian dan Pemantauan Kendaraan Berat: Pengendalian dan pemantauan terhadap kendaraan berat yang melampaui Muatan Sumbu Terberat (MST) belum mencapai tingkat optimal, berdampak pada kondisi infrastruktur jalan dan jembatan.
7. Kurangnya Pembaruan Kajian Jalan: Kajian jalan yang perlu dianalisis kembali atau diperbaharui secara rutin dan berkala sesuai dengan perkembangan terakhir kondisi lapangan.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah menjelaskan terkait persoalan dengan pembangunan infrastruktur jalan Cisayong, maka penelitian ini dilakukan untuk mengungkap bagaimana evaluasi kebijakan infrastruktur jalan Cisayong dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan yang Efektif dan Efisien dalam

Proses Pembangunan Infrastruktur jalan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya?

2. Bagaimana Aksesibilitas Kebijakan dalam Pembangunan Infrastruktur jalan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Kebijakan yang Responsif dalam Pembangunan Infrastruktur jalan di Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis terkait Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur jalan Cisayong pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. Karena itu tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas kebijakan yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan cisayong kabupaten tasikmalaya?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana aksesibilitas kebijakan dalam perubahan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan cisayong kabupaten tasikmalaya?
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana kebijakan yang tertera responsif dalam pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan cisayong kabupaten tasikmalaya?

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun penelitian memiliki manfaat, antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan ini memberikan sumbangsih literatur dan pengetahuan bagi sesama akademisi maupun peneliti, yang dapat bermanfaat untuk memperluas dan memperdalam kajian, konsep, hingga teori tentang evaluasi kebijakan infrastruktur jalan pada lembaga pemerintah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Pemerintah; terutama Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Penulis; penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran guna menambah dan mengembangkan wawasan, pengalaman, serta pengetahuan dalam memahami masalah-masalah dalam pemerintahan terutama mengenai evaluasi kebijakan infrastruktur jalan pada lembaga pemerintah.
- c. Masyarakat; agar masyarakat mengetahui tentang program-program pembangunan infrastruktur jalan yang akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat.
- d. Peneliti; untuk referensi, bahan penelitian, bahan pengembangan, serta pendalaman wawasan seputart masalah-masalah dalam konsep evaluasi dan pembangunan infrastruktur.

**F. Kerangka Pemikiran**

Tugas pemerintah daerah melibatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks politis dan administratif, fokus utama pemerintah daerah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang memadai, efektif, efisien, ekonomis, transparan, partisipatif, dan demokratis. Pencapaian ini dapat direalisasikan dengan membangun infrastruktur yang berkualitas untuk kepentingan masyarakat. Proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan penting untuk dilakukan. Lembaga yang berwenang melakukan proses evaluasi adalah lembaga- lembaga non departemen yang masing-masing dari organisasi itu merupakan suatu organisasi sebagai pecahan atau sub organisasi dari organisasi yang lebih besar, yaitu pemerintah. Dan pemerintah ini pun merupakan sub organisasi atau sub sistem dari yang lebih besar, yaitu negara. Selanjutnya, berkaitan dengan judul dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa teori yang dianggap mempunyai relevansi dengan judul tersebut. Hal ini dilakukan agar pembahasan kriteria atau variabel dalam judul berdasarkan sumber dan memiliki dasar teorinya. Oleh karena itu, negara dapat dianggap sebagai suatu organisasi, yang terdiri dari serangkaian fungsi. Fungsi tersebut merujuk pada suatu lingkungan kerja tertentu dan berkaitan dengan keseluruhan sistem. Dalam konteks negara, fungsi-fungsi tersebut dinamakan sebagai jabatan. Dengan demikian, negara dapat diartikan sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai jabatan.

Dengan demikian, negara adalah suatu organisasi, dalam pengertian yang lebih luas organisasi itu adalah aspek statis dari



administrasi dimana manajemen merupakan aspek dinamisnya. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa proses evaluasi sebagai salah satu fungsi dasar dari manajemen adalah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen negara. Senada dengan pendapat di atas, Kriteria yang paling sering digunakan untuk memberikan penilaian positif atau negatif pada suatu proyek ialah seberapa dekat hasil proyek itu dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, dan apakah pencapaian itu dilaksanakan secara efisien atau tidak. Jelas masuk akal bahwa diberikan perhatian pada efisiensi dan bahwa diperhatikan pula apakah sumber-sumber daya suatu proyek dipergunakan secara lebih baik di suatu tempat daripada di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, penggunaan sumber-sumber daya secara efektif-biaya (*cost effective*) merupakan segi yang amat penting dalam evaluasi, tetapi karena beberapa alasan perhatian pada efisiensi itu harus didukung oleh perhatian pada segi-segi yang lain.

Oleh karena itu, dalam bidang kebijakan publik, definisi evaluasi kebijakan publik yang terkenal sebagai berikut: Evaluasi kebijakan publik adalah proses sistematis untuk menentukan dan menganalisis informasi tentang program, proyek, atau kebijakan pemerintah untuk menilai efektivitas dan dampaknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di atas, menyoroti elemen-elemen kunci evaluasi kebijakan, termasuk pendekatan yang terorganisir, pengumpulan dan analisis data, serta penilaian terhadap sejauh mana kebijakan atau program mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn juga menekankan pentingnya perencanaan dan penetapan tujuan yang jelas dalam konteks

evaluasi kebijakan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari proses evaluasi. Berdasarkan anggapan dasar tersebut di atas, maka penulis mencoba membuat dan menyusun proposisi sebagai berikut: Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Cisayong dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan bagi masyarakat didukung oleh aspek penentuan standar dan tolak ukur evaluasi. Adanya evaluasi terkait fakta di lapangan, adanya perbandingan fakta hasil evaluasi lapangan dengan standar evaluasi yang memadai, serta adanya perumusan saran dan pengambilan tindakan korektif.

Teori yang mendasari dalam kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah teori William Dunn (2018). Teori ini sebagai alat atau pisau bedah yang akan digunakan dalam menganalisis persoalan dalam penelitian yang disusun. Penggunaan teori evaluasi ini diharapkan akan menjadi kerangka analisis tentang berbagai persoalan yang terjadi dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur jalan yang melewati Kecamatan Cisayong tersebut. Pada konteks yang lain teori evaluasi pembangunan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam upaya membedah dalam kasus persoalan pembangunan disuatu daerah. Teori evaluasi kebijakan menurut William N Dunn (2018) terdapat 4 dimensi, diantaranya adalah:

Pertama, fokus utama adalah efektivitas. Dalam kegiatan evaluasi, penekanan pada aspek ini terletak pada pencapaian hasil yang

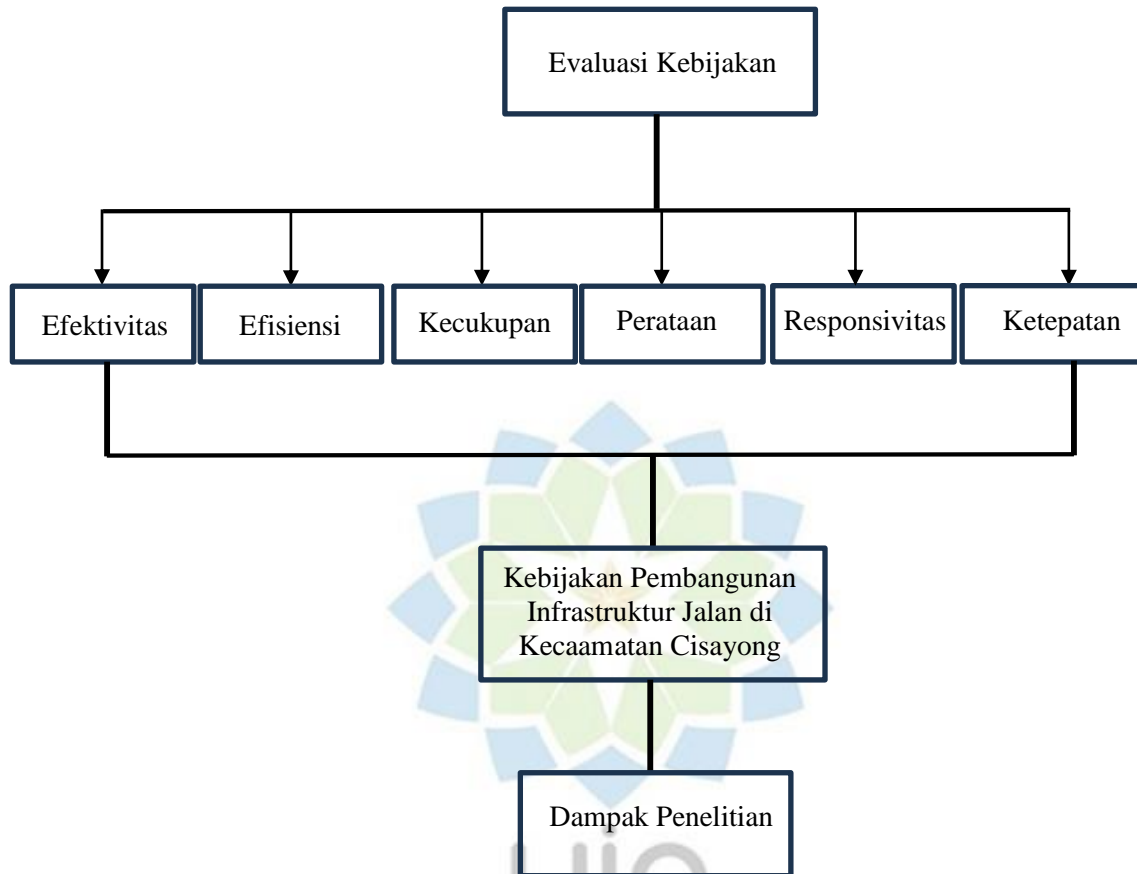
diinginkan dari suatu kebijakan. Diperiksa apakah tujuan yang diharapkan dari kebijakan tersebut telah tercapai.

Kedua, perhatian tertuju pada efisiensi. Kriteria ini memfokuskan pada masalah sumber daya, yaitu sejauh mana sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Ketiga, kecukupan atau adekuasi menjadi sorotan berikutnya. Aspek ini lebih menyoroti kemampuan hasil kebijakan dalam menangani masalah kebijakan, terutama sejauh mana pencapaian hasil dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi.

Keempat, pemerataan atau ekuitas menjadi perhatian berikutnya. Kriteria ini mengevaluasi distribusi biaya dan manfaat, terutama apakah telah tersebar secara adil di antara kelompok masyarakat, khususnya kelompok sasaran dan penerima manfaat. Dengan demikian, untuk memudahkan memahami kerangka pemikiran, maka peneliti membuat ringkasan dalam bentuk model kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Evaluasi kebijakan sendiri merupakan suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan, evaluasi ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kebijakan tersebut dalam meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka evaluasi yang digunakan dalam diagram ini terdiri dari enam dimensi utama:

1. **Efektivitas:** Mengukur sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, apakah pembangunan jalan berhasil

meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi waktu tempuh?

2. **Efisiensi:** Menilai sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan output yang maksimal. Apakah biaya pembangunan jalan sebanding dengan manfaat yang diperoleh?
3. **Kecukupan:** Mengukur apakah kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan yang dibangun sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apakah jalan yang dibangun mampu menampung volume lalu lintas yang ada?
4. **Perataan:** Menilai sejauh mana manfaat pembangunan jalan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu. Apakah pembangunan jalan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial?
5. **Responsivitas:** Mengukur seberapa cepat dan tepat kebijakan merespons perubahan kondisi. Apakah pembangunan jalan sudah mempertimbangkan perubahan kebutuhan masyarakat di masa depan, seperti pertumbuhan penduduk atau perubahan pola aktivitas?
6. **Ketepatan:** Menilai kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai yang dianut, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan. Apakah pembangunan jalan sudah memperhatikan aspek lingkungan dan sosial?

Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Cisayong. Informasi ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait perbaikan kebijakan yang sudah ada atau perumusan kebijakan baru yang lebih efektif dan efisien.